

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kombinasi Bisnis

2.1.1 Pengertian

Tujuan utama dari bisnis suatu perusahaan adalah untuk menghasilkan keuntungan. Sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan keuntungan dan valuasi yang lebih besar, perusahaan berupaya untuk terus bertumbuh dan berkembang. Secara umum, perusahaan dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tersebut dengan melakukan akuisisi atau membeli perusahaan untuk dilakukan kombinasi bisnis (Martani, 2017) dalam Indrawati (2020). Proses kombinasi bisnis kerap kali menghasilkan nilai wajar kekayaan bersih yang lebih tinggi sehingga meningkatkan valuasi suatu perusahaan. Penggabungan usaha juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja suatu entitas. Dalam jangka panjang, kombinasi bisnis dapat memberikan nilai tambah untuk perusahaan salah satunya ialah peningkatan harga saham perusahaan di pasar modal.

Kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi (juga dikenal sebagai investor/ induk perusahaan) memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis (juga dikenal sebagai *investee*/ anak perusahaan). Tujuan dari pengendalian adalah agar investor induk memiliki hak

atas imbal hasil variabel dari hubungan dengan *investee* dan kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Investor yang memenuhi kriteria tertentu dapat diidentifikasi sebagai pengendali *investee*, bahkan jika mereka memiliki kepemilikan kurang dari 50% hak suara.

PSAK 65 paragraf tujuh (07) menyatakan bahwa investor dapat memiliki hak kendali atas *investee* jika hanya jika investor tersebut memiliki seluruh karakteristik berikut:

a) Memiliki kekuasaan atas *investee*

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 10-14 PSAK 65 tentang kekuasaan. Jika investor memiliki hak untuk membuat dampak signifikan dalam memengaruhi imbal hasil *investee*, investor memiliki kekuasaan atas *investee*. Kekuasaan berasal dari hak. Mungkin lebih mudah untuk menilai kekuasaan jika kekuasaan atas *investee* diperoleh secara langsung dari hak suara yang dimiliki pemegang saham. Akan tetapi, dalam kasus lain, menilai kekuasaan akan lebih rumit, misalnya ketika kekuasaan berasal dari satu atau lebih perjanjian kontrak. Jika ada dua atau lebih investor, investor dengan kepemilikan saham lebih besar atau lebih signifikan lah yang memiliki hak kendali. Investor dapat memiliki kekuasaan atas *investee* meskipun terdapat pengaruh signifikan dari entitas lain. Akan tetapi, investor yang hanya memiliki hak protektif tidak memiliki kuasa atas *investee* serta tidak memiliki kendali atas *investee*.

b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*

Hal ini dijelaskan secara lanjut dalam PSAK 65 pada paragraf 15 dan 16 mengenai imbal hasil. Investor dikatakan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan mereka pada *investee* (memiliki sebagian atau seluruh hak kepemilikan/saham) jika imbal hasil tersebut memiliki potensi fluktuasi sebagai akibat dari kinerja *investee*. Imbal hasil dapat bernilai positif saja, negatif saja, atau keduanya positif dan negatif. Bahkan jika hanya ada satu investor yang dapat mengendalikan *investee*, pihak lain (beberapa pihak) dapat berbagi pengembalian atas *investee*, misalnya pemilik kepentingan nonpengendali mendapatkan bagian laba dari *investee*.

c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor

Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam paragraf 17 dan 18 PSAK 65 sehubungan dengan hubungan antara hak kekuasaan dan hak atas imbal hasil. Suatu entitas (investor) mengendalikan *investee* jika investor tersebut tidak hanya memiliki kuasa atas *investee* dan eksposur (hak atas imbal hasil) tetapi juga menggunakan otoritas tersebut dalam memengaruhi imbal hasil atas keterlibatan investor tersebut dengan *investee*. Oleh karena itu, investor dengan hak pengambilan keputusan memutuskan apakah mereka bertindak sebagai diri mereka sendiri (prinsipal) atau agen. Investor tidak mengendalikan *investee* ketika investor tersebut menggunakan wewenang pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada mereka jika investor tersebut bertindak sebagai agen.

Otoritas atau kendali yang disebutkan sebelumnya dapat dicapai dengan berbagai cara. Sebagai contoh, dengan memiliki hak opsi (instrumen yang dapat dikonversi), hak suara, perjanjian kontraktual, kombinasi beberapa cara, atau dengan memiliki agen yang berkemampuan mengarahkan aktivitas relevan (*relevant activities*) untuk kepentingan mereka sebagai investor. Dalam lampiran A PSAK 65, aktivitas relevan adalah aktivitas *investee* yang memiliki signifikansi terhadap profitabilitas *investee*, seperti pengelolaan aset keuangan, penentuan struktur pendanaan, dan lain-lain. Lebih lanjut, tujuan pengendalian tersebut yakni memperoleh manfaat dari entitas anak.

Selain yang telah disebutkan dalam paragraf tujuh (07) di atas, lampiran B PSAK 65 menyebutkan beberapa pertimbangan lain yang dapat membantu dalam penentuan apakah suatu investor dikatakan memiliki hak kendali atas *investee* ialah sebagai berikut:

- a. Tujuan dan desain anak perusahaan
- b. Apa saja yang menjadi aktivitas relevan *investee* serta bagaimana dasar keputusan aktivitas tersebut dibuat
- c. Apakah hak investor memberikan *investee* kemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan terkait
- d. Apakah investor memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan mereka dengan *investee* (eksposur)
- e. Dalam jumlah imbal hasil, apakah investor memiliki kemampuan untuk menggunakan hak kuasa atas *investee* untuk memengaruhi hal tersebut

Dalam situasi tertentu, sulit untuk menentukan apakah hak investor telah mencukupi investor tersebut untuk memiliki kekuasaan atas *investee*. Apabila hal itu terjadi, akan dilakukan perhitungan nilai kekuasaan dengan mengevaluasi bukti yang berisikan apakah investor memiliki kemampuan praktis untuk mengarahkan secara sepihak *relevant activities*. Adapun pertimbangan yang tidak terbatas pada hal berikut adalah sebagai berikut:

- a. Investor dapat menunjuk atau menyetujui personil manajemen kunci *investee* yang berkemampuan untuk mengarahkan aktivitas relevan tanpa perlu memiliki hak kontraktual untuk itu.
- b. Investor dapat menginstruksikan *investee* untuk melakukan atau memveto atau menentang perubahan apapun pada transaksi penting untuk kepentingan investor tanpa perlu memiliki hak kontraktual untuk melakukan itu.
- c. Investor dapat mengontrol pemilihan anggota organ pengatur *investee* atau perolehan mandat dari pemegang hak suara lain, juga dalam proses nominasi.
- d. Pihak yang memiliki relasi dengan investor disebut personil manajemen kunci *investee* (sebagai contoh, *chief executive officer investee* dan *chief executive officer investor* adalah orang yang sama).
- e. Pihak yang memiliki hubungan dengan investor merupakan mayoritas dari anggota organ pengatur *investee*.

Akan tetapi, terkadang terdapat beberapa hal yang mengindikasikan hubungan khusus antara investor dan *investee* yang menunjukkan bahwa investor

memiliki lebih dari sekadar kepentingan pasif pada *investee*. Satu dari sekian contoh ialah operasional bisnis *investee* yang bergantung pada investor, misalnya *investee* mengandalkan investor untuk mendanai porsi yang signifikan atas operasi milik *investee*. Hal tersebut memberikan investor hak atas imbal hasil *investee* lebih besar dari hak serupa lainnya, biasa disebut dengan eksposur. Oleh karena itu, hal tersebut disebut sebagai kekuasaan atas *investee*.

2.2 Kepentingan Nonpengendali

Menurut Beams dalam Dea Sugita (2014, p. 4) dijelaskan bahwa pada dasarnya, klasifikasi kepemilikan pemegang saham minoritas sebagai kewajiban tidak konsisten. Hal itu disebabkan oleh investasi ekuitas pada kekayaan bersih yang dikonsolidasi oleh pemegang saham di luar struktur afiliasi menjadi gambaran hak minoritas.

Kepentingan nonpengendali (*non-controlling interest*) adalah entitas yang tidak secara langsung menjadi atribusi pada entitas induk. Induk perusahaan melampirkan kepentingan nonpengendali dalam pos ekuitas laporan posisi keuangan konsolidasian secara terpisah dari ekuitas milik entitas induk. Perubahan kepemilikan/saham entitas induk pada entitas anak yang tidak membuat entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak disebut sebagai transaksi ekuitas. Transaksi ini juga mengindikasikan adanya transaksi dengan pemilik dalam kapasitas mereka sebagai pemilik.

Entitas mengalokasikan dan setiap komponen laba rugi dan komponen penghasilan komprehensif lain kepada induk perusahaan dan pemilik kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga membuat alokasi seluruh penghasilan

komprehensif lain kepada induk perusahaan dan pemilik kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut menimbulkan saldo defisit untuk kepentingan nonpengendali. Jika perusahaan anak memiliki saham preferen kumulatif beredar yang diklasifikasikan sebagai ekuitas (milik kepentingan nonpengendali), entitas tersebut menghitung bagian milik mereka atas laba atau rugi setelah dikurangi dividen atas pemegang saham tersebut jika ada dividen yang diumumkan.

Apabila proporsi kepemilikan oleh kepentingan nonpengendali mengalami perubahan, entitas melakukan penyesuaian jumlah tercatat kepentingan pengendali dan nonpengendali. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran akan perubahan kepemilikan relatif mereka dalam entitas anak. Entitas tersebut mengakui selisih antara nilai kepentingan nonpengendali tercatat, menyesuaikannya dengan nilai wajar imbalan yang dibayarkan atau diterima secara langsung, lalu menyerahkannya kepada pemilik entitas induk.

2.3 Kehilangan Pengendalian

Investor dapat memengaruhi kemampuan imbal hasil serta mengendalikan *investee* ketika mereka mendapatkan eksposur. Sebuah entitas induk berhak atas imbal hasil entitas anak apabila memiliki seluruh atau sebagian saham entitas tersebut. Hal ini juga berarti bahwa entitas induk berhak atas pelepasan seluruh maupun sebagian kepemilikan tersebut. Apabila entitas induk kehilangan hak kendali atas entitas anak, maka entitas induk melakukan hal berikut:

- a) Berhenti mengakui aset dan liabilitas entitas anak sebelumnya pada laporan posisi keuangan konsolidasi entitas induk.

- b) Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu saat tanggal hilangnya pengendalian pada nilai wajarnya. Selain itu, induk perusahaan mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak sebelumnya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan.
- c) Mengakui setiap keuntungan atau kerugian sehubungan dengan hilangnya pengendalian yang disebabkan kepentingan pengendali sebelumnya.
Oleh karena itu, entitas induk tidak perlu membuat laporan keuangan konsolidasi dengan entitas anak yang sudah kehilangan hak kendali.

2.4 Entitas Investasi

2.4.1 Penentuan Entitas Investasi

Dalam kombinasi bisnis, penting untuk mengidentifikasi apakah suatu entitas induk merupakan entitas investasi. Terdapat empat paragraf dalam PSAK 65, yakni paragraf 27-30, yang membahas mengenai penentuan apakah suatu entitas disebut entitas investasi. Paragraf 27 PSAK 65 mengatakan bahwa entitas induk menentukan apakah mereka merupakan entitas investasi. Maka dari itu, berikut merupakan definisi entitas investasi:

- a) Entitas yang mendapatkan dana dari satu atau lebih pemberi dana (investor), bertujuan untuk memberikan investor tersebut jasa manajemen dana investasi.
- b) Entitas yang membuat perjanjian kepada investor bahwa tujuan bisnis mereka adalah untuk mengelola dana yang hanya digunakan untuk investasi

guna memperoleh *return* dari kenaikan nilai investasi, penghasilan investasi, bahkan keduanya.

- c) Entitas yang melakukan pengukuran serta evaluasi kinerja dari seluruh instrumen investasi pada nilai wajar.

Lebih lanjut, dalam menentukan apakah suatu entitas dikatakan entitas investasi, diperlukan pertimbangan seluruh fakta serta keadaan ketika menilai entitas tersebut, termasuk tujuan dan desainnya. Jika entitas memenuhi ketiga elemen definisi di atas, entitas tersebut adalah entitas investasi.

Pembahasan mengenai penilaian entitas investasi memenuhi definisi entitas investasi dibahas dalam paragraf 28 PSAK 65. Selain itu, entitas melakukan pertimbangan apakah entitas tersebut memiliki kesesuaian atau tidak dengan karakteristik khusus berikut:

- a) entitas berinvestasi pada lebih dari satu instrument;
- b) entitas memiliki lebih dari satu pemberi dana, dalam hal ini adalah investor;
- c) terdapat pihak yang bukan merupakan pihak berelasi dari entitas yang merupakan investor; dan
- d) terdapat bagian kepemilikan dalam bentuk ekuitas atau serupa yang dimiliki entitas.

Terdapat perbedaan dengan elemen definisi entitas investasi dimana karakteristik tersebut tidak harus dipenuhi seluruhnya. Apabila tidak terpenuhinya satu atau lebih karakteristik khusus, entitas tersebut tidak selalu diklasifikasikan sebagai bukan entitas investasi, melainkan perlu dilakukan kajian tambahan untuk menentukan entitas tersebut adalah entitas investasi atau bukan.

2.5 Laporan Keuangan Konsolidasi

2.5.1 Pengertian

Menurut Baker (2009, p. 85), laporan keuangan konsolidasi memaparkan posisi keuangan dan hasil dari kegiatan bisnis milik entitas induk (*controlling entity*) dan satu atau lebih entitas anak (*controlled entities*) dengan asumsi semua entitas merupakan suatu perusahaan atau entitas. Perusahaan yang menjadi pemegang mayoritas kepemilikan atau saham beredar suatu perusahaan lain memerlukan konsolidasi.

Menurut Beams (2007, p. 12), penyajian laporan keuangan konsolidasi adalah untuk memberikan informasi hasil operasi dan posisi keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan. Laporan ini ditujukan untuk pemegang saham dan kreditur. Hal ini menyebabkan kelompok entitas tersebut seolah-olah terlihat seperti entitas tunggal dengan satu atau lebih divisi atau cabang.

Lampiran A PSAK 65 menyebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasi (*consolidated financial statement*) adalah laporan keuangan yang berisikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak. Semua pos keuangan tersebut disatukan di dalam satu laporan yang menjadikan laporan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Pos-pos milik induk perusahaan dan anak yang disatukan memungkinkan munculnya kelebihan atau kekurangan yang biasa disebut dengan *goodwill*. Nilai *goodwill* tersebut menggambarkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi kombinasi bisnis. *Goodwill* dihasilkan melalui perhitungan: Harga perolehan + nilai wajar

kepentingan non pengendali – nilai wajar aset neto. Sebagai informasi tambahan, nilai wajar aset neto dihasilkan dari total aset dikurangi total liabilitas.

2.5.2 Persyaratan Akuntansi

Laporan keuangan konsolidasi diatur di dalam PSAK 65 tentang laporan keuangan konsolidasian. Adapun pedoman penerapannya diatur dalam lampiran B, merupakan bagian tidak terpisahkan dari PSAK 65, yang berisi penjelasan mengenai penerapan PSAK 65. Bagian ini juga memiliki kekuatan hukum/pengaturan yang sama dengan bagian lain PSAK 65. Beberapa hal mengenai persyaratan akuntansi dalam lampiran B PSAK 65 diantaranya:

a. Prosedur Konsolidasi

Hal ini diatur dalam paragraf PP86 lampiran B PSAK 65, dimana prosedur konsolidasi diantaranya:

- 1) Aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, serta arus kas sejenis milik entitas induk dengan entitas anak digabungkan.
- 2) Jumlah tercatat dari investasi induk di setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap anak dihapuskan (eliminasi), dijelaskan lebih lanjut dalam PSAK 22 mengenai perhitungan *goodwill*.
- 3) Aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra perusahaan sebagai transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh (laba atau rugi yang timbul dari transaksi dalam kelompok usaha yang diakui dalam aset dieliminasi seluruhnya). Penurunan nilai yang diakibatkan dari kerugian kelompok usaha mengharuskan adanya pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

b. Kebijakan Akuntansi yang Sama

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian memungkinkan adanya perbedaan penggunaan kebijakan akuntansi antar anggota kelompok usaha dengan entitas induk. Dalam kasus tersebut, laporan keuangan kelompok usaha tersebut dilakukan penyesuaian guna memastikan keseragaman.

c. Pengukuran

Dalam laporan keuangan konsolidasi, entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak sejak tanggal perolehan hak kendali sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan hak atas kendali terhadap entitas anak. Jika terdapat transaksi sebelum memperoleh pengendalian, induk perusahaan tidak perlu memasukkannya. Sebagai contoh, beban depresiasi diakui entitas induk sebesar nilai wajar aset terkait dan dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian setelah tanggal akuisisi.

d. Hak Suara Potensial

Dalam mengalokasikan proporsi perubahan ekuitas pada entitas induk dan anak, didasarkan pada proporsi kepemilikan yang ada, tidak dengan konversi hak suara potensial dan derivatif lainnya. Akan tetapi hal tersebut dikecualikan dalam keadaan tertentu.

e. Tanggal Pelaporan

Periode pelaporan entitas induk dan anak harus sama dalam laporan keuangan konsolidasian. Apabila terdapat perbedaan, entitas anak harus membuat informasi keuangan tambahan yang memuat tanggal yang sama

dengan laporan keuangan konsolidasi entitas induk guna mempermudah proses penyusunan laporan.